

# Konsep Simbiosis Mutualistik Sektor Formal dan Informal Perkotaan dalam Konflik Penggunaan Ruang

**Maria Kurnia Uswat Karsosemito Hadie**

## ABSTRAK

PKL sebagai sektor informal perkotaan selalu hadir memberikan fenomena tersendiri bagi ruang lingkup perkotaan. Salah satu indikasinya PKL berdampak pada perusakan keindahan tata kota. Kehadiran PKL dengan wujud fisik yang tidak teratur mengakibatkan tampilan yang mengganggu estetika kota. Keberadaan PKL sebagai sektor informal yang bersinggungan langsung dengan sektor perdagangan formal menimbulkan berbagai konflik.

Melalui kajian teoritis dari berbagai pustaka diperoleh bahwa konflik dibagi menjadi dua yaitu konflik kepentingan (the conflict of interest) yang dipengaruhi oleh stimulus dari dalam pelaku dan konflik penggunaan ruang (using of space) dipengaruhi oleh stimulus dari luar berupa elemen dan kondisi fisik. Penelitian ini menggunakan pendekatan rasionalistik yang mencakup aspek-aspek yang melibatkan empiri sensual, logik dan etik. Data yang telah diperoleh dianalisa menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif yang digunakan untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi karakter, potensi, permasalahan dan konflik.

Konsep penataan PKL yaitu konsep simbiosis mutualistik berupa konsep non fisik dan konsep fisik. Konsep non fisik terdiri dari konsep peningkatan daya tarik kawasan, konsep kelembagaan paguyuban, konsep legalitas PKL, konsep pembinaan, penyuluhan dan pelatihan serta konsep permodalan. Konsep fisik terdiri konsep sirkulasi, penataan parkir, perancangan dan penataan sarana usaha PKL yang tidak merugikan PKL dan sektor formal.

**Kata Kunci:** Pedagang Kaki Lima, konflik penggunaan ruang.

## I. PENDAHULUAN

Sektor perdagangan merupakan salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi yang besar. Terdapat dua sektor perdagangan dalam perkotaan yaitu sektor formal dan informal. Salah satu bentuk perdagangan sektor informal adalah Pedagang Kaki Lima atau yang sering disebut dengan PKL.

Kota yang hidup memerlukan manusia dan aktivitas untuk mengisi ruang terbukanya, termasuk ruang jalan. Aktivitas yang banyak dijumpai di jalanan Indonesia adalah perdagangan kaki lima. Kegiatan ini menghidupkan suasana jalan dan membuatnya lebih berkesan.

Konsep bahwa pedagang kaki lima sebagai komponen yang dapat meningkatkan suasana di jalan dianut juga oleh banyak kota di Asia Tenggara seperti Singapura (People Park, River Valley, Bugis Village, dan Chin Alley), Seoul (Nah It'aewon) dan Tokyo (Akihabara)

(Hariyono,2007). Kota-kota ini menyediakan ruang untuk PKL di trotoar kawasan perdagangan utama dalam rangka menciptakan kembali urban realm. Berlawanan dengan konsep ini, di Indonesia jumlah PKL yang terus meningkat secara dramatis sejak krisis moneter 1997, hingga berlebihan, tidak disediakan ruang untuk menampung PKL sehingga mengganggu. Para pedagang telah menutupi sebagian besar trotoar dan tak jarang hingga ke jalanan. Berjalan di kawasan PKL menjadi tidak nyaman dan berbahaya.

PKL selalu hadir memberikan fenomena tersendiri khususnya bagi ruang lingkup perkotaan. Salah satu indikasinya adalah PKL berdampak pada perusakan keindahan tata kota. Karena itu penelitian tentang PKL perlu dilakukan karena PKL tidak hanya menjadi isu di kota-kota di Indonesia saja, tetapi juga di kota-kota dunia, walaupun dalam penerapannya antara kota di Indonesia dengan kota di negara lain memiliki perbedaan.

Isu PKL ramai dibicarakan baik dalam interaktif wacana maupun non wacana di seputar masyarakat. Permasalahan PKL yang keberadaannya mulai tersebar menjadi permasalahan utama di kota Indonesia.

Keberadaan PKL di sepanjang koridor jalan menimbulkan konflik antara pemilik toko legal dan PKL sebagai pedagang ilegal. Pemilik toko sebagai pembayar pajak dan retribusi atas usahanya, merasa keberatan dengan keberadaan PKL karena mengurangi pendapatan mereka dengan cara menutupi display toko dan 'merebut' pembeli dengan barang yang lebih murah serta mencerminkan praktek tidak adil dalam berusaha, karena PKL tidak membayar pajak atas usaha mereka. Sementara PKL merasa bahwa merekalah yang menjadi magnet tujuan para pembeli. Mereka juga merasa berhak atas ruang kota karena pada prakteknya mereka juga membayar sejumlah retribusi informal pada agen-agen pemerintah kota dan preman untuk memperoleh tempat usaha. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah antisipatif (penertiban PKL baik dilokalisir maupun tidak) sebagai upaya meminimalisasi konflik.

Ditinjau dari keberadaannya, seharusnya PKL berpotensi sebagai pendukung sektor formal yang ada. Namun menurut hasil observasi, tidak demikian kenyataan yang ada pada kawasan studi. Keberadaan PKL menutup sebagian besar akses konsumen menuju sektor formal pertokoan yang ada di sepanjang koridor jalan ini. Keberadaan mereka menimbulkan kerugian yang besar pada perdagangan sektor formal yang berada tepat di belakang mereka.

Dengan wujud fisik yang tidak teratur, kehadiran PKL ini mengakibatkan tampilan yang mengganggu estetika kota. Keberadaan PKL ini juga memenuhi trotoar sehingga ruang yang tersedia untuk pejalan kaki sangat terbatas yang mengakibatkan pejalan kaki memilih untuk berjalan di bahu

jalan. Sebagian besar kios PKL tidak hanya menutup trotoar bahkan masuk ke badan jalan. Hal tersebut sangat mengganggu ketertiban, mengingat jalan yang ada tidak terlalu lebar dan arus lalu lintas yang sangat padat ditambah dengan pejalan yang memakai jalan ini karena tidak bisa berjalan di trotoar.

Konflik antara pedagang formal dan PKL dapat dikelompokkan pada dua jenis yaitu konflik dalam penggunaan ruang (*using of space*) dan konflik kepentingan (*the conflict of interest*) (Pawitro, 2004).

Usaha pemerintah untuk merelokasi PKL sering mengalami kegagalan, terkesan sporadik dan bersifat sementara. Kebijakan yang ada tentang pelarangan PKL di lokasi studi merupakan hal yang sangat sulit dilaksanakan, mengingat PKL adalah suatu fenomena dalam masyarakat yang tidak mungkin dihilangkan karena menjadi kekuatan ekonomi kerakyatan. Kegagalan ini terjadi karena penanganan masalah PKL tidak didasari pemahaman yang mendalam mengenai akar permasalahan, dan tidak menyadari potensi besar yang dapat dihasilkan bila ditangani secara tepat dan komprehensif. Karena itu diperlukan suatu konsep untuk Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dapat menguntungkan berbagai pelaku yang ada, tanpa mengakibatkan terganggunya estetika kota dan ketertiban umum

## II. DASAR TEORI

Persoalan pada keberadaan Pedagang Kaki Lima pada dasarnya mencakup persoalan visual, fungsional dan perilaku. Persoalan visual muncul karena penataan komponen-komponen perancangan kota yang tidak teratur atau tidak selaras berdasarkan pertimbangan arsitektural maupun keindahan. Persoalan fungsional berkaitan dengan hubungan antara jenis kegiatan yang bertumpuk pada satu ruang yang umumnya diwujudkan oleh kondisi psikis tertentu seperti kenyamanan, keselamatan maupun keamanan. Persoalan perilaku dipengaruhi oleh berbagai kepentingan penggunaan ruang yang menimbulkan perilaku yang beragam. Persoalan ketiga sangat berkaitan dengan hak penggunaan ruang, sangat kompleks dan sering menimbulkan kerawanan sosial. Persoalan dan konflik tersebut muncul karena ketidaksesuaian kepentingan/hak dengan fungsional setiap segmen ruangnya.

Menurut Pawitro (2004), pada intinya konflik antara pedagang formal dan sektor informal (PKL) dapat dikelompokkan pada dua jenis yaitu konflik dalam penggunaan ruang (*using of space*) dan konflik kepentingan (*the conflict of interest*).

1. Konflik penggunaan (*the space using conflict*) pada ruang publik berupa pedestrian, jalan dan ruang terbuka
2. Konflik kepentingan (*the conflict of interest*) pada ruang publik berupa : pedestrian, jalan dan ruang terbuka.

## III. METODE

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan. tahapan pertama yaitu analisa statistik deskriptif,. Tahapan kedua yaitu analisa dengan metode matriks partisipatif digunakan untuk menganalisa data hasil dari analisa statistik deskriptif untuk mengidentifikasi

konflik yang terjadi antar pelaku. Tahapan terakhir yaitu analisa triangulasi, dilakukan untuk mendapatkan konsep-konsep penataan pedagang kaki lima yang menguntungkan berbagai pihak yang terkait. metode triangulasi disajikan dalam bentuk tabel yang membandingkan antara, fakta empiris, teori dan studi kasus.

## IV. HASIL PENELITIAN

### A. Analisa karakter dan preferensi pelaku

Dari karakter dan preferensi PKL, pedagang dan konsumen dapat ditarik kesimpulan awal bahwa :

- Definisi menguntungkan bagi PKL adalah lokasi yang ramai sehingga terdapat pangsa pasar yang besar dan dapat memberikan keuntungan. Dari kesimpulan diatas dapat dikatakan bahwa PKL sebenarnya mau dipindahkan kemanapun atau berjualan kapanpun asalkan ada daya tarik kawasan yang mampu menarik konsumen untuk datang dan berbelanja.
- Definisi menguntungkan bagi pedagang formal bila mendapatkan akses untuk pembeli dan untuk loading dock.
- Definisi menguntungkan bagi pengunjung adalah mendapatkan barang dengan harga murah

### B. Analisa karakter ruang dan preferensi pelaku

Dari karakter ruang dan preferensi pelaku dapat ditarik kesimpulan awal bahwa :

Lokasi

- PKL menyukai lokasi yang ramai dan strategis
- Apabila diadakan relokasi PKL, kawasan yang baru diusahakan tetap ramai dan strategis dan tidak terlalu jauh dengan lokasi semula
- Sebagian besar PKL menetap sehingga perlu diberikan tempat khusus untuk PKL yang tidak mengharuskan PKL untuk berpindah-pindah.
- pedagang menginginkan PKL berjualan di lokasi khusus yang memang disediakan khusus untuk PKL sehingga tidak menutup akses pedagang formal
- Pengunjung menginginkan PKL berjualan di lokasi khusus yang memang disediakan khusus untuk PKL sehingga pengunjung/pembeli merasa lebih nyaman dan aman dalam melakukan transaksi
- Pemerintah menginginkan relokasi namun tidak berhasil dikarenakan lokasi baru dianggap kurang ramai oleh PKL sehingga mengizinkan PKL kembali dan tetap berjualan di lokasi semula dengan konsep pasar sore.
- PKL tidak perlu direlokasi namun memerlukan penataan

Tempat usaha

- Trotoar dan badan jalan
- Letak tempat usaha tetap dekat dengan sirkulasi pejalan kaki dan kendaraan
- PKL tidak boleh menempati ruang secara penuh pada bangunan yang melatarbelakanginya
- PKL tidak boleh menempati kedua sisi tepi jalan
- Tidak bercampur dengan aktivitas pergerakan lalu lintas namun mudah dicapai.
- PKL masih diijinkan menempati lokasi awal sehingga tidak teratur.

#### Sarana Usaha

- PKL diwajibkan untuk membawa pulang gerobak dagangannya setelah berjualan.
- Sarana Usaha PKL berbeda- beda menurut jenis dagangan dan kebutuhan ruangnya sehingga perancangan sarana usaha tidak bisa disamaratakan.
- Sebagian besar PKL merasa cocok dengan sarana usaha yang sekarang sehingga apabila dilakukan perancangan ulang bentuknya disesuaikan dengan sarana usaha saat ini.
- Sarana usaha disediakan dan diatur letaknya
- Sarana usaha yang digunakan bersifat tidak permanen dan mudah dipindah-pindah serta tidak menutup ruko
- sarana usaha berupa gerobak beroda dan gelaran , mudah dipindah dan dibawa pulang
- Pengunjung lebih menyukai jenis sarana gerobak yang bertenda
- upaya pemerintah dalam mendisain dan menyediakan sarana usaha tidak memperhatikan kebutuhan dan karakter dari PKL sehingga tidak dipakai. Diperlukan perancangan sarana usaha yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan ruang PKL.

#### Pola

- Sebagian besar PKL setuju untuk dikelompokkan menurut jenis barang dagangannya.
- PKL diperbolehkan pada batasan kawasan tertentu dengan pola linier dan berkelompok
- Dikelompokkan menurut jenis barang dagangannya karena lebih fleksibel dan lebih mudah untuk memilih jenis barang yang diinginkan.
- Pemerintah belum mengatur persebaran PKL.

#### Sirkulasi

- Diperlukan sirkulasi untuk pengunjung sehingga transaksi PKL dapat berlangsung aman dan nyaman
- Perlu diberikan pemisah untuk ruang pejalan, ruang PKL, dan ruang kendaraan
- Diperlukan penyediaan akses bagi pedagang formal ruko untuk sirkulasi pengunjung dan loading dock barang.
- Perlu diberikan pemisah untuk ruang pejalan, ruang PKL, dan ruang kendaraan

#### Parkir

- Sebagian besar PKL menggunakan sepeda motor sehingga perlu diberikan ruang parkir sepeda motor yang lebih banyak dibandingkan parkir mobil.
- Perlu disediakan parkir sepeda motor dan mobil untuk pedagang formal dengan kebutuhan parkir sepeda motor lebih banyak.
- Perlu disediakan parkir mobil dan parkir sepeda motor untuk pengunjung dengan kapasitas parkir sepeda motor lebih banyak.
- Perlu disediakan halte angkutan umum untuk mewedahi pengunjung yang menggunakan angkutan umum

#### Waktu berdagang

- Waktu berdagang dimulai pukul 15.00 (setelah toko formal tutup). Preferensi pedagang jenis sarana yang lesehan
- Konsep pasar sore perlu diberikan penarik pengunjung sehingga mampu menghidupkan pasar sore dan PKL mau tetap berjualan di sore hari.

### C. Analisa Konflik Penggunaan Ruang

Dari analisa konflik penggunaan ruang dapat disimpulkan bahwa untuk meminimalisir konflik penggunaan ruang yang terjadi diperlukan :

- Penyediaan ruang untuk PKL yang tidak mengganggu aktivitas kegiatanruang perkotaan
- Penciptaan dan ketersediaan ruang yang nyaman dan aman bagi pengunjung / pembeli
- Penyediaan ruang bagi pejalan kaki yang aman dan nyaman
- Penyediaan ruang bagi pengendara dengan aksesibilitas yang lancar serta penyediaan ruang parkir yang memadai
- Penciptaan ruang di sekitar aktivitas sektor lokasi usaha yang aman dan nyaman dan dapat menunjang dalam perkembangan usaha
- Perumusan dan sosialisasi kebijakan yang menciptakan suasana ruangperkotaan yang efektif dan akomodatif sesuai dengan kebutuhan masing-masingpihak terkait.

### D. Analisa faktor penentu untuk mengurangi konflik penggunaan ruang

Dari analisa karakter dan preferensi pelaku serta analisa konflik penggunaan ruang dapat disimpulkan faktor-faktor penentu untuk mengurangi konflik

#### Lokasi

- Disediakan lokasi khusus untuk PKL namun tetap berada di wilayah lokasi awal.

#### Tempat usaha

- Letak tempat usaha tetap dekat dengan sirkulasi pejalan kaki dan kendaraan sehingga mudah dicapai, namun tidak bercampur dengan aktivitas pergerakan lalu lintas pejalan kaki dan pengendara kendaraan.

#### Sarana Usaha

- Sarana usaha disediakan dan diatur letaknya
- Sarana usaha dirancang sesuai karakter dan kebutuhan ruang PKL.
- Sarana usaha diwajibkan untuk dibawa pulang setelah berjualan
- Untuk memudahkan membawa pulang bentuk sarana usaha beroda.

#### Pola

- PKL dikelompokkan menurut jenis dagangannya
- PKL diperbolehkan pada batasan kawasan tertentu dengan pola linier dan berkelompok.sesuai jenisnya.

#### Sirkulasi

- Memberikan akses dan ruang sirkulasi untuk PKL, pedagang formal, pejalan kaki dan pengendara kendaraan.
- Diberikan pemisah untuk ruang pejalan, ruang PKL, dan ruang kendaraan Parkir
- Perlu disediakan parkir mobil dan parkir sepeda motor untuk pengunjung dengan kapasitas parkir sepeda motor lebih banyak dan dekat dengan lokasi PKL yang dituju.
- Perlu disediakan halte angkutan umum untuk mewedahi pengunjung yang menggunakan angkutan umum

#### Prasarana Usaha

- Perlu penyediaan kran umum dan tempat sampah umum yang lokasinya dekat dengan setiap kios PKL
- .diperlukan penerangan tambahan untuk PKL dan jalur sirkulasi pejalan dan pengendara..

## E. Analisa Konsep Simbiosis Mutualistik

### Analisa kajian pustaka

Dari analisa kajian pustaka dapat disimpulkan bahwa untuk meminimalisir konflik yang terjadi diperlukan :

#### Jenis Barang Dgangan

- Pada dasarnya PKL menjual jenis dagangan yang beragam, selain penjual makanan, PKL lain yang ada tetap diperbolehkan berjualan, selama jenis barang dagangan tidak serupa dengan pedagang formal.

#### Penyuluhan , pelatihan dan pembinaan

- Tujuan utama dari penyuluhan, pembinaan dan pelatihan adalah untuk membatasi peningkatan jumlah PKL seiring dengan meningkatnya kesadaran mereka akan keterampilannya untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik

#### Bantuan modal

- Selain pihak pemerintah dan swasta, LSM dapat dilibatkan dalam pemberian bantuan modal pada PKL.

#### Legalitas

- Bentuk legalitas yang sesuai adalah legalisasi lokasi yang semula ilegal menjadi legal
- Dalam memberikan pelegalan status tidak semua PKL dilegalkan. Pelegalan PKL didasari menurut jenis barang/jasa yang ditawarkan, waktu usaha, dan lokasi tertentu.
- Status legal PKL dikuatkan dengan pemberian surat ijin usaha untuk : (1). Memudahkan dalam pengaturan, pengawasan, dan pembatasan jumlah;(2). Membantu dalam penarikan retribusi.

#### Daya tarik kawasan

- Disamping menjadikan kawasan studi menjadi pusat jajanan /kuliner, untuk meningkatkan daya tarik pengunjung perlu diperhatikan kualitas komoditas, daya tarik visual (terkait dengan tampilan visual bangunan toko), kewajaran harga komoditas, kenyamanan berbelanja (terkait dengan lokasi, tempat parkir kendaraan,kemudahan mengenali tempat, dan jam buka toko), serta pelayanan terhadapkonsumen.

#### Paguyuban

- Fungsi utama dari paguyuban adalah untuk menyamakan aspirasi dan intepretasi semua kelompok pelaku sehingga tercipta kesamaan visi.

#### Keamanan dan Kenyamanan

- Keamanan dan kenyamanan pengunjung merupakan prioritas utama agar lokasi bisa tetap hidup dan ramai. Kenamanan dan kenyamanan pengunjung meliputi kewanaman dan kenyamanan tempat penjualan, kemudahan dan kewanaman aksesibilitas

#### Keuntungan

- PKL dapat memberikan rasa aman yang menjadi barrier untuk keamanan aktivitas pedagang formal karena posisinya di depan bangunan formal, namun harus ditata
- agar akses pedagang formal tidak terhalangi.
- PKL menyediakan kebutuhan barang dan jasa yang relatif murah bagi masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah
- Jumlah yang besar, ragam bentuk usaha dan keunikan merupakan potensi yang besar untuk menghias wajah kota, apabila ditata dan diatur dengan baik

#### Waktu berdagang

- Waktu berdagang PKL yang dianggap paling sesuai adalah sejalan dengan waktu berdagang sektor formal.

#### Penataan

- PKL dapat ditempatkan pada lokasi semula dengan membebaskan sebagian dari ruas jalan untuk digunakan bagi aktivitas Pedagang Kaki Lima, dengan syarat penataan sarana PKL yang tidak menutup akses bagi pedagang formal dengan mengatur tempat-tempat Pedagang kaki Lima supaya tidak menutupi massa bangunan lain yang ada didekatnya. Pembuatan jarak-jarak tertentu antar massa bangunan Pedagang Kaki Lima dengan bangunan formal diharapkan dapat memperlihatkan bagian muka bangunan formal dibelakangnya.

#### Lokasional

- Pengelolaan lokasional yang sesuai untuk Samnhudi adalah perpaduan antara pengaturan dan pemindahan.

#### Tempat usaha

- Tempat usaha PKL yang sesuai adalah di pinggir jalan dengan membebaskan sebagian dari ruas jalan untuk digunakan bagi aktivitas Pedagang Kaki Lima.

#### Sarana usaha

- Sarana usaha yang diperbolehkan adlaah sarana usaha non permanen yang dapat dibawa pulang setelah berjualan.

#### Pola penataan

- Pola penataan PKL yang sesuai adalah dengan pola penyebaran memanjang dan dikelompokkan menurut jenis dagangannya.

#### Sirkulasi

- Memberikan akses dan ruang sirkulasi untuk PKL, pedagang formal, pejalan kaki dan pengendara kendaraan.
- Jalan harus menjadi elemen ruang terbuka yang memiliki dampak visual yang positif.
- Jalan harus dapat memberikan orientasi kepada pengguna dan membuat lingkungan menjadi jelas terbaca dengan diberikan pemisah untuk ruang pejalan, ruang PKL, dan ruang kendaraan

#### Parkir

- penataan parkir dipinggir jalan masih dapat digunakan dengan tetap memfungsikan keberadaan jalur pejalan kaki dan menata sudut-sudut parkir yang sesuai dengan lebar dan tingkat pelayanan jalan tersebut.
- Perlu disediakan parkir mobil dan parkir sepeda motor untuk pengunjung dengan kapasitas parkir sepeda motor lebih banyak dan dekat dengan lokasi PKL yang dituju.

#### Prasarana Penunjang

- PKL tidak memerlukan fasilitas dan utilitas pelayanan umum.

### Analisa studi kasus

Dari analisa studi kasus dapat disimpulkan bahwa untuk meminimalisir konflik yang terjadi diperlukan :

#### Jenis Barang Dgangan

- Agar bisa saling menguntungkan diperlukan adanya perbedaan barang dagangan antara PKL dan pedagang formal.

- Perbedaan dapat berupa jenis maupun kualitas. sehingga tidak terjadi perebutan konsumen maupun persaingan harga antara pedagang formal dan PKL
- Jenis barang dagangan tidak harus satu jenis, namun ada spesialisasi untuk menguatkan karakter kawasan.

#### Penyuluhan, pelatihan dan pembinaan

- Selain penyuluhan, pelatihan dan pembinaan pengembangan usaha dan ketrampilan, perlu diberikan juga pembinaan mengenai pelayanan konsumen dan manajemen usaha dan pengelolaan modal, seperti strategi penetapan harga barang dagangan, strategi menjual produk, dan kiat-kiat pendanaan usaha.

#### Bantuan modal

- Pelaku usaha di kawasan studi mampu melakukan usahanya tanpa memerlukan bantuan modal dari pihak luar namun untuk mengikuti program penataan mereka membutuhkan bantuan tambahan modal, setidaknya untuk pengadaan sarana usaha sesuai ketentuan dari program penataan.

#### Legalitas

- Legalitas PKL tidak hanya untuk kawasannya saja namun juga diperlukan legalitas PKL sebagai pelaku usaha.

#### Daya tarik kawasan

- Pedagang formal merupakan daya tarik utama dari kawasan studi
- Untuk menambah frekuensi kunjungan diperlukan karakter khusus pada kawasan.

#### Paguyuban

- Anggota paguyuban selain pelaku diperlukan juga kelompok pendamping yang bersifat netral seperti LSM, Yayasan dan LBH (sebagai penengah masalah hukum)

#### Keamanan dan Kenyamanan

- peningkatan keamanan dan kenyamanan pada kawasan studi memerlukan penjagaan dan pengawasan dari aparat keamanan yang siaga dan siap setiap saat

#### Keuntungan

- PKL tetap dapat berjualan di lokasi dan waktu yang sama dengan pedagang formal dengan pengaturan akses yang tidak menutup perdagangan formal karena sektor informal juga mempunyai potensi untuk menarik pengunjung dan sektor informal secara tidak langsung memberikan perlindungan kepada sektor formal saat terjadi demonstrasi dsb

#### Waktu berdagang

- PKL tetap dapat berjualan di waktu yang sama dengan pedagang formal dengan pengaturan akses yang tidak menutup perdagangan formal

#### Penataan

- Diperlukan konsep penataan PKL yang mampu mengakomodasi semua kebutuhan namun juga terjaga kebersihan dan keamanannya.
- Untuk menjaga kebersihan bangunan pedagang formal dijadikan orientasi sarana usaha PKL agar bangunan formal tidak menjadi daerah belakang, dan ruang negatif.

#### Lokasional

- Lokasi PKL dapat diletakkan di lokasi semula namun ditata agar tidak mengganggu perdagangan formal.

#### Tempat usaha

- Letak tempat usaha tetap dekat dengan sirkulasi pejalan kaki dan kendaraan sehingga mudah dicapai, namun tidak

bercampur dengan aktivitas pergerakan lalu lintas pejalan kaki dan pengendara kendaraan.

#### Sarana usaha

- Sarana usaha Sarana usaha diwajibkan untuk dibawa pulang setelah berjualan
- Sarana usaha yang memungkinkan adalah gerobak, meja dan gelaran
- Orientasi dagangan menghadap ke arah toko formal

#### Pola penataan

- Menyesuaikan karakter lokasi kawasan studi penataan PKL berpola linier.

#### Sirkulasi

- Diberikan pemisah untuk ruang pejalan, ruang PKL, dan ruang kendaraan
- Disediakan ruang transaksi untuk pengunjung dan PKL.

#### Parkir

- Tidak adanya area parkir memaksa penggunaan model parkir on street. Namun penataannya diupayakan untuk tidak membebani jalan.

#### Prasarana penunjang

- Prasarana umum dan tempat sampah pada tiap PKL tidak terlalu diperlukan asalkan pengendalian sampah dapat diatur secara mandiri oleh PKL dengan pengawasan yang ketat dan penerapan denda.
- Diperlukan tambahan penerangan jika PKL beroperasi hingga malam hari dan tidak diperlukan penambahan bila berjualan hanya hingga sore hari, namun diperlukan perancangan sarana usaha yang tidak menghalangi masuknya sinar matahari.

### Triangulasi Konsep Simbiosis Mutualistik

Triangulasi konsep didapatkan dengan membandingkan tiga hasil analisa yaitu analisa fakta empiris melalui analisa karakter dan preferensi pelaku, analisa kajian pustaka dan analisa studi kasus. Analisa triangulasi menghasilkan konsep yaitu :

#### Konsep non spatial

- Menjadikan kawasan studi sebagai pusat PKL jajanan dan kuliner.
- Spesifikasi jenis barang dagangan, yaitu makanan dan minuman.
- PKL Pakaian dan sepatu dipindahkan ke area yang tidak berdekatan dengan pedagang formal sejenis.
- Memberikan penyuluhan, pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja, pengembangan usaha dan pelayanan konsumen sesuai dengan kemampuan, latar belakang dan karakter PKL
- Memberikan bantuan modal pada PKL bekerjasama dengan pihak ketiga (swasta, koperasi, BPR, LSM dsb) untuk pengembangan usaha dan untuk mengikuti program penataan.
- Melegalkan kawasan sebagai kawasan PKL
- Memberikan legalitas pada pelaku PKL
- Menjadikan kawasan studi sebagai pusat PKL jajanan dan kuliner.
- Membentuk paguyuban beranggotakan semua pelaku konflik dan pihak penengah.
- Menata PKL sesuai dengan karakter PKL dan sesuai dengan kebutuhan ruang masing-masing pelaku.
- Meningkatkan penjagaan dan pengawasan

- PKL tetap dapat berjualan di lokasi dan waktu yang sama dengan pedagang formal dengan pengaturan akses yang tidak menutup perdagangan formal karena sektor informal juga mempunyai potensi untuk menarik pengunjung dan sektor informal secara tidak langsung memberikan perlindungan kepada sektor formal saat terjadi demonstrasi dsb.
- Dengan pengaturan seperti ini pengunjung mendapatkan konsep *'one stop shopping'* di satu kawasan, pada satu kawasan konsumen sudah dapat membeli barang dagangan dari sektor formal dan sekaligus sektor informal.
- PKL berjualan di waktu yang sama dengan pedagang formal dengan pengaturan akses yang tidak menutup perdagangan formal

#### Konsep spatial

- PKL dapat ditempatkan pada lokasi semula dengan membebaskan sebagian dari ruas jalan untuk digunakan bagi aktivitas Pedagang Kaki Lima, dengan syarat penataan sarana PKL yang tidak menutup akses bagi pedagang formal dengan mengatur tempat-tempat Pedagang kaki Lima supaya tidak menutupi massa bangunan lain yang ada didekatnya.
- Diberikan jarak antara letak sarana usaha PKL dengan bangunan formal, dan antara sarana usaha PKL dengan sarana usaha PKL lainnya, sehingga dapat memperlihatkan bagian muka bangunan formal dibelakangnya.
- Sarana usaha PKL ditata berorientasi ke arah bangunan formal agar bangunan formal tidak menjadi ,daerah belakang, dan ruang negatif.
- Pengelolaan lokasional yang sesuai untuk Samnhudi adalah perpaduan antara pengaturan dan pemindahan.
- Pengaturan lokasi PKL dapat diletakkan di lokasi semula namun ditata agar tidak mengganggu perdagangan formal.
- Pemindaha lokasi PKL dipilih dengan jarak yang tidak jauh dari lokasi semula dan mempunyai karakter yang sesuai dengan kaarakter PKL yang dipindahkan.
- Letak tempat usaha tetap dekat dengan sirkulasi pejalan kaki dan kendaraan sehingga mudah dicapai, namun tidak bercampur dengan aktivitas pergerakan lalu lintas pejalan kaki dan pengendara kendaraan.
- Tempat usaha PKL yang sesuai adalah di pinggir jalan dengan membebaskan sebagian dari ruas jalan untuk digunakan bagi aktivitas Pedagang Kaki Lima.
- Sarana usaha yang diperbolehkan adalah sarana usaha non permanen yang diwajibkan untuk dibawa pulang setelah berjualan
- Sarana usaha yang memungkinkan adalah gerobak beroda , dan gelaran
- Perancangan sarana usaha yang mempunyai 3 fungsi, yaitu sarana berjualan, sarana penyimpanan dan sarana pengangkutan barang.
- Sarana usaha dirancang sesuai karakter dan kebutuhan ruang PKL.
- PKL ditata dengan pola linier dan berkelompok sesuai dengan jenis barang dagangannya.
- Memberikan akses dan ruang sirkulasi untuk PKL, pedagang formal, pengunjung, pejalan kaki dan pengendara kendaraan sesuai karakter pergerakan pelaku.

- Jalan harus menjadi elemen ruang terbuka yang memiliki dampak visual yang positif.
- Jalan harus dapat memberikan orientasi kepada pengguna dan membuat lingkungan menjadi jelas terbaca
- Diberikan pemisah untuk ruang pejalan, ruang PKL, dan ruang kendaraan
- Penggunaan model parkir on street, dengan tetap memfungsikan keberadaan jalur pejalan kaki dan menata sudut-sudut parkir yang sesuai dengan lebar dan tingkat pelayanan jalan tersebut.
- Penyediaan area parkir mobil dan parkir sepeda motor dengan kapasitas parkir sepeda motor lebih banyak dan dekat dengan lokasi yang dituju.
- Penyediaan area parkir dan halte angkutan umum untuk mewadahi pengunjung yang menggunakan angkutan umum
- Tidak diperlukan prasarana usaha tambahan, namun diperlukan program penganangan kebersihan secara mandiri dan penataan PKL yang tidak menghalangi cahaya matahari

#### V. KESIMPULAN

Penyusunan konsep simbiosis mutualistik untuk penataan PKL erat kaitannya dengan karakter masing-masing pelaku dan konflik kepentingan serta konflik kebutuhan ruang antar pelaku.

Berdasarkan triangulasi konsep, maka dirumuskan konsep simbiosis mutualistik dalam adalah :

Konsep non fisik, terdiri dari :

1. Konsep Peningkatan Daya Tarik Kawasan:
  - Menjadikan kawasan studi sebagai pusat PKL jajanan dan kuliner.
2. Konsep Penganangan Kebersihan, Keamanan dan Kenyamanan
  - Menata PKL sesuai dengan karakter PKL dan sesuai dengan kebutuhan ruang masing-masing pelaku.
  - Meningkatkan penjagaan dan pengawasan keamanan di bawah koordinasi dari paguyuban yang bekerjasama dengan aparat keamanan.
  - Membuat program penanganan kebersihan secara mandiri di bawah koordinasi paguyuban dengan sanksi yang tegas dan pengawasan yang ketat.
3. Konsep Kelembagaan Paguyuban :
  - Membentuk paguyuban beranggotakan semua pelaku konflik dan pihak penengah.
4. Konsep Legalitas PKL
  - Melegalkan kawasan sebagai kawasan PKL
  - Memberikan legalitas pada pelaku PKL
5. Konsep Pembinaan, Penyuluhan dan Pelatihan
  - Memberikan penyuluhan, pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja, pengembangan usaha dan pelayanan konsumen sesuai dengan kemampuan, latar belakang dan karakter PKL
6. Konsep Pemberian Bantuan Modal :
  - Memberikan bantuan modal pada PKL bekerjasama dengan pihak ketiga (swasta, koperasi, BPR, LSM, dsb) untuk pengembangan usaha dan untuk mengikuti program penataan.

Konsep Fisik, terdiri dari :

1. Konsep Sirkulasi

- Memberikan akses dan ruang sirkulasi untuk PKL, pedagang formal, pengunjung, pejalan kaki dan pengendara kendaraan sesuai karakter pergerakan pelaku.
- Jalan harus menjadi elemen ruang terbuka yang memiliki dampak visual yang positif.
- Jalan harus dapat memberikan orientasi kepada pengguna dan membuat lingkungan menjadi jelas terbaca
- Diberikan pemisah untuk ruang pejalan, ruang PKL, dan ruang kendaraan

2. Konsep Parkir

- Penggunaan model parkir on street, dengan tetap memfungsikan keberadaan jalur pejalan kaki dan menata sudut-sudut parkir yang sesuai dengan lebar dan tingkat pelayanan jalan tersebut.
- Penyediaan area parkir mobil dan parkir sepeda motor dengan kapasitas parkir sepeda motor lebih banyak dan dekat dengan lokasi yang dituju.
- Penyediaan area parkir dan halte angkutan umum untuk mewadahi pengunjung yang menggunakan angkutan umum.

3. Konsep Penataan PKL

- 1) Berdasarkan jenis barang dagangan
  - Spesifikasi jenis barang dagangan
- 2) Berdasarkan pola penataan
  - PKL ditata dengan pola linier dan berkelompok sesuai dengan jenis barang dagangannya.
  - Berdasarkan waktu berdagang
  - PKL berjualan di waktu yang sama dengan pedagang formal dengan pengaturan akses yang tidak menutup perdagangan formal.
- 3) Berdasarkan lokasional
  - Pengelolaan lokasional yang sesuai adalah perpaduan antara pengaturan dan pemindahan.
  - Pengaturan lokasi PKL dapat diletakkan di lokasi semula namun ditata agar tidak mengganggu perdagangan formal.
  - Pemindahan lokasi PKL dipilih dengan jarak yang tidak jauh dari lokasi semula dan mempunyai karakter yang sesuai dengan kaarakter PKL yang dipindahkan.
- 4) Berdasarkan tempat usaha
  - Letak tempat usaha tetap dekat dengan sirkulasi pejalan kaki dan kendaraan sehingga mudah dicapai, namun tidak bercampur dengan aktivitas pergerakan lalu lintas pejalan kaki dan pengendara kendaraan.
  - Tempat usaha PKL yang sesuai adalah di pinggir jalan dengan membebaskan sebagian dari ruas jalan untuk digunakan bagi aktivitas Pedagang Kaki Lima.
  - Diberikan jarak antara letak sarana usaha PKL dengan bangunan formal, dan antara sarana usaha PKL dengan sarana usaha PKL lainnya, sehingga dapat memperlihatkan bagian muka bangunan formal dibelakangnya.
- 5) Berdasarkan sarana usaha
  - Sarana usaha yang diperbolehkan adalah sarana usaha non permanen yang diwajibkan untuk dibawa pulang setelah berjualan

- Sarana usaha yang memungkinkan adalah gerobak beroda , dan gelaran
- Perancangan sarana usaha yang mempunyai 3 fungsi, yaitu sarana berjualan, sarana penyimpanan dan sarana pengangkutan barang.
- Sarana usaha PKL ditata berorintasi ke arah bangunan formal agar bangunan formal formal tidak menjadi daerah belakang, dan ruang negatif.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- 1) Alisjahbana, Ir. H. MA. Urban Hidden Economy Peran tersembunyi Sektor Informal Perkotaan, Lembaga Penelitian ITS, Surabaya, 2003.
- 2) Azizah Siti, Model Penataan PKL di Pusat Kota, ITS, Surabaya, 2002
- 3) Bakri, Masykuri, dkk. Metodologi Penelitian Kualitatif, Tinjauan Teori dan Praktis. Lembaga Penelitian Universitas Islam Malang kerjasama Visipress. Surabaya, 2003
- 4) Budiharjo, Eko.. Kota Berkelanjutan. Ikatan Alumni. Bandung, 1993
- 5) Djokomono, Imam, Ruang Publik Kota, Pedagang Kaki Lima, dan Public Transportation, Proceedings 1st International Seminar National Symposium, Exhibition and Workshop in Urban Design, Yogyakarta, 2004
- 6) Ernawati, Jenny dkk. Preferensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Faktor-faktor Lokasi Tempat Mangkal dalam Melakukan Aktivitas Perdagangan di Kotamadya Malang. Penelitian. Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Malang, 1995
- 7) Gulo, W, Metodologi Penelitian, Grasindo, Jakarta, 2002
- 8) Hariyono, Paulus, Sosiologi Perkotaan, Bumi Aksara, Jakarta, 2007
- 9) Hasan, Iqbal, M. Ir. M.M.. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian & Aplikasinya. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002
- 10) Hidayati, A. Nurul, Ir., MTP. Perencanaan Linkage System dalam Perancangan Kota. Planning Journal Tb 1/No.2 Juli – Agustus 2001: ITN Malang. 2001
- 11) Indrawati, Peran Masyarakat Pemilik / Penghuni Lahan Pinggiran Trotoar terhadap Pengendalian Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pusat Kota Surakarta, Proceedings 1st International Seminar National Symposium, Exhibition and Workshop in Urban Design, Yogyakarta, 2004
- 12) Kurniawan, Eddy B, studi Penataan Aktivitas Penunjang di Kawasan Alun-alun Kota Malang, ITS, Surabaya, 2000
- 13) Levy, John M, Contemporary Urban Planning 4th edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, USA, 1997
- 14) Manning, Christ & Effendi, Tadjudin Noer, Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1991
- 15) Muhadjir, Noeng, Metodologi Penelitian Kualitatif Telaah Positivistik Rasioalistik dan Phenomenologik, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1989
- 16) Nurmandi, Achmad, Manajemen Perkotaan, Lingkaran Bangsa, Yogyakarta, 1999

- 17) Palupi, Nola dan Raharjo, Minto, Pengaruh Arsitektur Perkantoran dan Perdagangan terhadap Pola Penyebaran PKL di Jalan Slamet Riyadi Surakarta, UMS, 2003
- 18) Pawitro, Udjiyanto, Konflik Penggunaan Kepentingan pada 'Ruang Publik' berupa Ruang Terbuka, Pedestrian, dan Jalan dengan Kasus Empat Pasar di Kota Bandung, Proceedings 1st International Seminar National Symposium, Exhibition and Workshop in Urban Design, Yogyakarta, 2004
- 19) Poerbo, Heru, Trotoir Kota : Studi Kasus Bandung – Jakarta. Proceeding 1st International Seminar National Symposium, Exhibition and Workshop in Urban Design, Yogyakarta, 2004
- 20) Purnama, Aulia..Studi Aspek yang Diprioritaskan pada Faktor Ekonomi, Sosial, dan Fisik dalam penentuan Lokasi PKL di Kota Mataram. Tesis. Program pasca Sarjana, Magister Teknik Pembangunan Kota, UNDIP, Semarang. 2003
- 21) Rachbini, Didik J dan Abdul Hamid, Ekonomi Informal Perkotaan Gejala Involusi Gelombang Kedua. LP3ES, Jakarta, 1994.
- 22) Rossi, Aldo, The Architecture of the City, MIT Press, Massachusetts, and London, England, 1982
- 23) Sajogyo, Perekonomian Desa, Yayasan Obor Indonesia.
- 24) Sardjito, Laporan Penelitian Alternatif Pemecahan Masalah Pedagang Kaki Lima Pada Tata Ruang Fisik Kota Surabaya, 1989
- 25) Sidharta, Amir, Harian Kompas Agustus 2002
- 26) Soewarno,Urip, Migrasi dan Kesempatan Kerja dalam Hubungannya dengan Sektor Informal pada Beberapa Kota di Jawa, Kertas Kerja Kongres IPADI ke II, Bandung, 1978
- 27) Spreiregen, Paul D, Urban Design, The Architecture of Towns and Cities, Mc Graw-Hill Book Company,1985
- 28) Tarigan, Robinson. Perencanaan Pebangunan Wilayah. Bumi Aksara, Jakarta,2005.
- 29) Tsani, Abdul Muhammad.Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Purwokerto, Studi kasus Kawasan Pusat Kota. Skripsi. Universitas Brawijaya Malang. 2005.
- 30) Wardhana, Mahendra, Menciptakan Estetika, Desain dengan Metodologi Penelitian (Berbasis Teori Estetika Premis Desain Mahendra Wardhana), Jombang, 2002
- 31) Widodo, Ahmadi. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha PKL Kota Semarang. Tesis. Program pasca Sarjana, Magister Teknik Pembangunan Kota, UNDIP, Semarang. 2000
- 32) Wirosardjono, Soetjipto, Masalah Tenaga Kerja di Sektor Informal, Prisma V-9, Jakarta, 1976